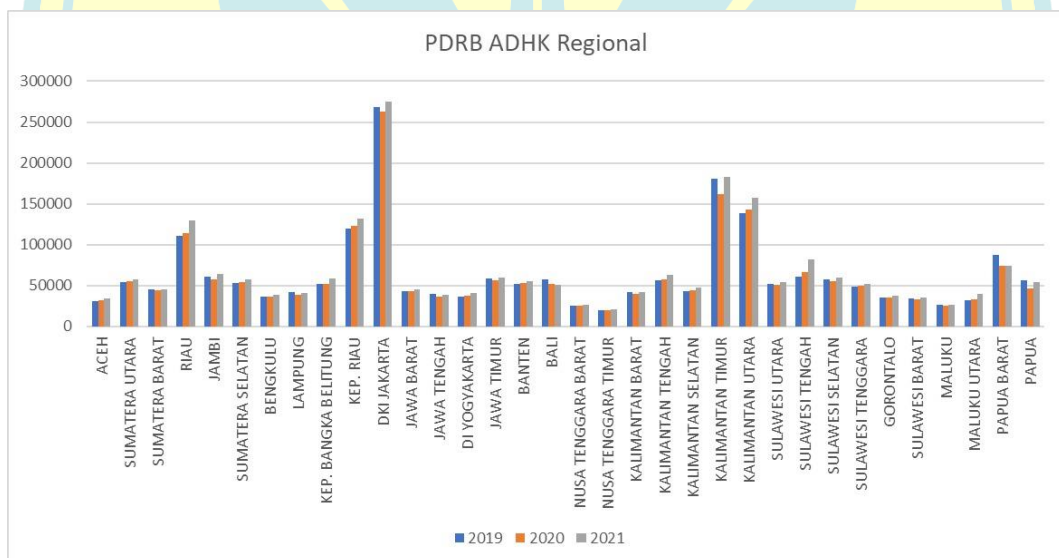


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator krusial dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara dalam jangka panjang. Menurut Sukirno (2016) pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Dalam konteks Indonesia, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) menjadi tolok ukur utama untuk melihat produktivitas nyata tanpa pengaruh inflasi.



Gambar 1.1 Tingkat PDRB ADHK Regional

Sumber : BPS (Data diolah peneliti)

Dari data PDRB ADHK Regional diatas menunjukkan variasi yang sangat signifikan antar provinsi, di mana DKI Jakarta tetap mendominasi struktur ekonomi nasional secara substansial. Kestabilan pertumbuhan PDRB ADHK sangat

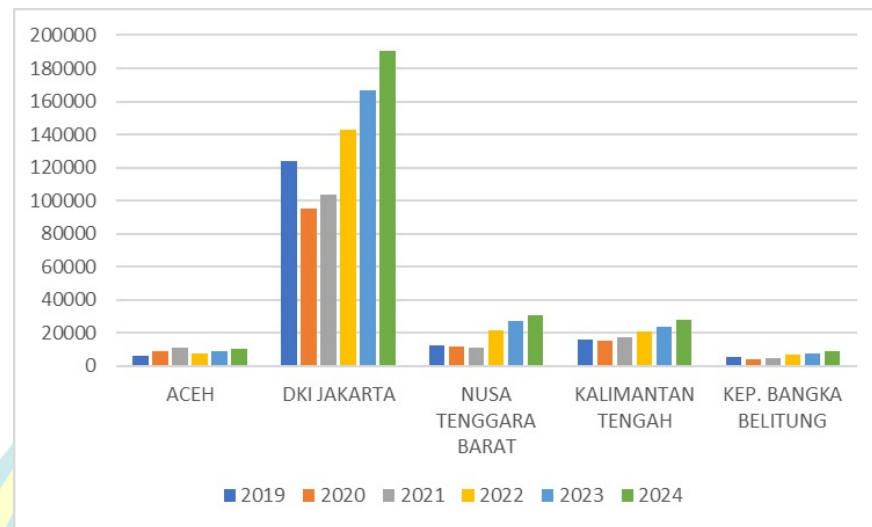
bergantung pada optimalisasi sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh setiap daerah. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor penggerak pertumbuhan ekonomi regional menjadi agenda penting bagi pengambil kebijakan di Indonesia.

Teori pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik menekankan peran penting modal dan teknologi sebagai pendorong utama output nasional. Robert Solow dalam model pertumbuhan neoklasiknya menggarisbawahi bahwa akumulasi kapital dan kemajuan teknologi merupakan kunci peningkatan produktivitas (Solow, 1956). Visualisasi PDRB ADHK lintas provinsi menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi terkonsentrasi di Pulau Jawa dan beberapa wilayah kaya sumber daya alam di Kalimantan serta Sumatra. Hal ini menunjukkan adanya disparitas yang lebar yang memerlukan analisis mendalam mengenai variabel-variabel determinannya selama periode 2019 hingga 2024. Peningkatan PDRB ADHK yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui sinergi antara investasi fisik dan adaptasi teknologi. Fenomena ini membuat determinan pertumbuhan ekonomi menjadi semakin kompleks dan bersifat multidimensi, melibatkan aspek finansial, teknologi, dan sosial.

Investasi Swasta, yang mencakup Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), merupakan komponen vital dalam pembentukan modal tetap bruto. Kehadiran investasi tidak hanya membawa modal segar, tetapi juga transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja baru bagi penduduk lokal (Todaro, 2015). Studi Novalia (2023) dalam penelitiannya menyatakan investasi memiliki pengaruh multiplier effect yang mampu menstimulasi sektor-sektor pendukung lainnya di suatu daerah. Namun,

kenyataannya penyebaran investasi di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan konsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki infrastruktur lebih mapan. Hal ini menyebabkan kontribusi investasi terhadap PDRB ADHK tidak seragam di seluruh wilayah Nusantara selama periode pengamatan. Ketidakseimbangan ini menuntut analisis mendalam mengenai sejauh mana investasi benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang tertinggal.

Selain investasi, sisi konsumsi yang diwakili oleh pengeluaran perkapita masyarakat juga memainkan peran sentral dalam siklus ekonomi. Berdasarkan teori Keynesian, pengeluaran konsumsi merupakan pendorong utama permintaan agregat yang pada akhirnya akan menstimulasi produksi (Keynes, 1936). Tinggi rendahnya pengeluaran perkapita mencerminkan tingkat kemakmuran dan daya beli masyarakat di suatu daerah tertentu. Ketika pengeluaran perkapita meningkat, produsen akan cenderung meningkatkan output mereka untuk memenuhi permintaan yang ada (Swastika & Arifin, 2023). Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan nilai PDRB ADHK melalui penguatan sektor domestik. Namun, fluktuasi ekonomi global dan dampak pasca-pandemi sempat menekan daya beli masyarakat di berbagai belahan Indonesia selama periode pengamatan.



Gambar 1.2 Tingkat Investasi Swasta (PMDN dan PMA) Provinsi

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (Data diolah peneliti)

Fenomena menarik terjadi pada dinamika investasi di Indonesia selama periode 2019 hingga 2024 yang menunjukkan pola fluktuatif di tingkat provinsi. Berdasarkan data perbandingan investasi diatas, terlihat bahwa DKI Jakarta mengalami fluktuasi namun tetap berada di angka yang jauh melampaui daerah lain seperti NTB atau Bengkulu. Ketimpangan ini sering kali disebabkan oleh perbedaan ketersediaan infrastruktur fisik dan kepastian hukum di tingkat daerah. Investasi yang besar di suatu daerah diharapkan mampu berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi yang membuat output (PDRB ADHK) menjadi tinggi di wilayah tersebut (Anggini et al., 2022). Analisis terhadap data investasi per tahun sangat penting untuk melihat konsistensi pemerintah daerah dalam menarik minat investor swasta. Ketidakmerataan arus modal ini secara langsung tercermin pada postur ekonomi regional yang terekam dalam data PDRB.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Athosra & Muhyiddin (2022) menunjukkan bahwa modal fisik memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Namun, temuan ini sering kali berbenturan dengan kenyataan di lapangan di mana investasi besar tidak selalu diiringi dengan peningkatan kesejahteraan lokal. Penelitian oleh Shao & Yang (2016) menemukan adanya fenomena *resource curse* di beberapa provinsi kaya sumber daya alam namun memiliki pertumbuhan ekonomi rendah. Gap penelitian muncul ketika variabel teknologi digital mulai dimasukkan ke dalam model pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya fokus pada variabel makro konvensional tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan digital masyarakat. Hal ini menjadi urgensi bagi penelitian ini untuk mengisi celah tersebut dengan menggunakan proksi kepemilikan perangkat digital.

Novelty atau kebaruan dalam penelitian ini terletak pada integrasi tiga dimensi penentu makroekonomi regional yang mengombinasikan akumulasi kapital fisik terintegrasi, pendekatan daya beli riil, dan analisis spasial pada periode krisis kesehatan global. Pertama, berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya memisahkan analisis dampak antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), penelitian ini secara spesifik mengintegrasikan keduanya ke dalam satu variabel agregat, yaitu Investasi Swasta. Pendekatan ini dinilai lebih komprehensif dalam memotret total ekspansi kapital non-pemerintah dan efek transfer teknologi (*technology spillover*) yang masuk ke daerah. Kedua, dari sisi mesin penggerak output, penelitian ini menggunakan variabel Pengeluaran Riil Per Kapita masyarakat alih-alih menggunakan pendekatan pendapatan

konvensional. Penggunaan proksi pengeluaran riil ini menawarkan representasi yang jauh lebih akurat mengenai daya beli aktual, tingkat kesejahteraan, dan konsumsi riil masyarakat di tingkat akar rumput. Ketiga, kebaruan model ini diperkuat oleh penggunaan rentang data panel kontemporer dari tahun 2019 hingga 2024. Periode pengamatan ini sangat krusial dan memiliki nilai strategis tinggi karena menangkap dinamika transmisi kebijakan serta ketahanan ekonomi 34 provinsi di Indonesia dalam menghadapi *structural shock* pada fase sebelum, saat, dan sesudah pandemi COVID-19. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang lebih objektif mengenai determinan PDRB ADHK di era pasca-pandemi.

Aspek pengeluaran perkapita juga memberikan gambaran mengenai kualitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tingkat provinsi. Pengeluaran perkapita yang tinggi biasanya berkorelasi dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, sesuai dengan konsep pembangunan manusia (Mankiw, 2018). Di Indonesia, pengeluaran perkapita sering kali digunakan sebagai alat ukur efektivitas kebijakan bantuan sosial dan stabilitas harga pangan. Menurut studi Nasriyah & Aji (2021) fluktuasi harga komoditas global sering kali memukul daya beli masyarakat, terutama di provinsi yang sangat bergantung pada sektor ekstraktif. Penelitian ini mencoba melihat sejauh mana kekuatan konsumsi internal mampu membentengi PDRB ADHK dari guncangan eksternal. Sinergi antara daya beli yang kuat dan investasi yang masif diharapkan menjadi formula ideal bagi pertumbuhan ekonomi regional.

Hubungan antara investasi swasta (PMDN dan PMA) dengan PDRB ADHK sering kali diperdebatkan oleh para ekonom regional di Indonesia. Sjöholm (2018) berpendapat bahwa PMA memiliki dampak yang lebih besar karena membawa keunggulan teknologi asing. Namun, Tajudin (2023) berargumen bahwa PMDN lebih stabil dalam menjaga ketahanan ekonomi lokal karena lebih memahami karakteristik pasar domestik. Selama tahun 2019-2024, pergeseran minat investasi ke sektor hilirisasi industri memberikan pengaruh yang berbeda terhadap output daerah. Provinsi dengan kebijakan pro-investasi cenderung mencatatkan nilai PDRB ADHK yang lebih stabil meskipun di tengah tekanan ekonomi. Analisis mendalam mengenai kontribusi masing-masing jenis investasi terhadap pertumbuhan regional menjadi bagian inti dalam penelitian ini.

Data pengeluaran perkapita menunjukkan adanya tren kenaikan bertahap namun dengan titik awal yang sangat berbeda antar provinsi.



Gambar 1.3 Data Pengeluaran Perkapita Provinsi Indonesia

Sumber : BPS (Data diolah peneliti)

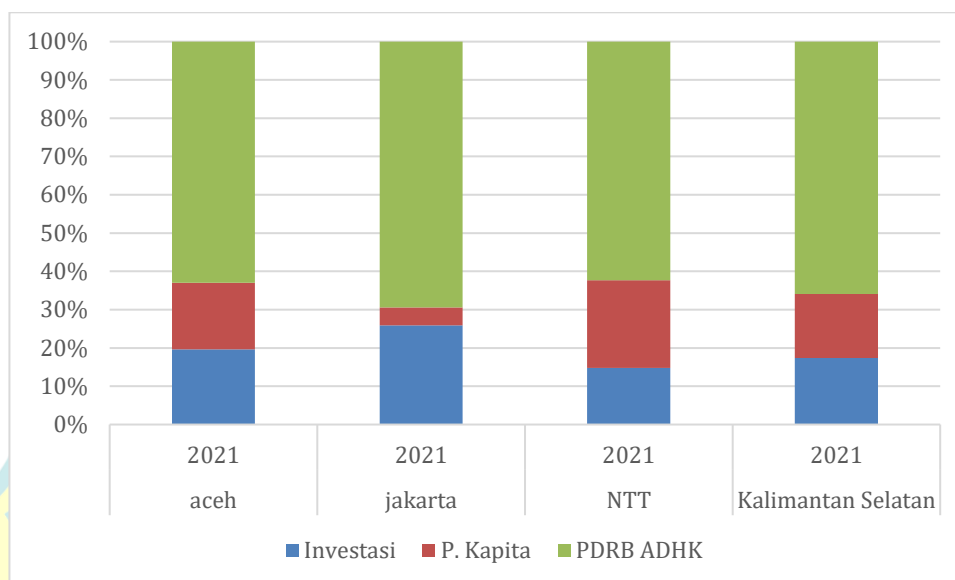
Berdasarkan data diatas, DKI Jakarta kembali menunjukkan angka pengeluaran perkapita yang jauh melampaui wilayah-wilayah seperti Bengkulu, NTT, maupun Papua. Perbedaan ini menciptakan fragmentasi pasar domestik yang menyebabkan pertumbuhan PDRB ADHK cenderung terpusat di kawasan metropolitan. Menurut Maharani & Bodirochminarni (2024) masyarakat dengan pendapatan rendah cenderung memiliki pola konsumsi yang terbatas pada kebutuhan pokok, sehingga kurang mampu menstimulasi sektor jasa modern. Kondisi ini memperlihatkan bahwa redistribusi pendapatan masih menjadi tantangan besar dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penelitian ini akan menguji apakah pengeluaran perkapita memang memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB ADHK di seluruh provinsi.

Secara teoritis, integrasi antara investasi, dan konsumsi masyarakat akan menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif. Investasi menyediakan lapangan kerja, yang kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat untuk berbelanja (Dimand et al., 2008). Namun, di Indonesia, sering kali terjadi mismatch di mana investasi yang masuk tidak sesuai dengan ketersediaan keterampilan digital tenaga kerja lokal. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak berjalan seiring dengan penurunan angka pengangguran atau kemiskinan di beberapa daerah. Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan menghubungkan ketiga variabel tersebut ke dalam satu model ekonometrika. Pemahaman terhadap interaksi antar variabel ini sangat penting untuk menyusun strategi pembangunan wilayah yang lebih terintegrasi.

Provinsi-provinsi di Indonesia menghadapi tantangan unik dalam menjaga stabilitas PDRB ADHK mereka selama lima tahun terakhir. Dinamika politik lokal dan kebijakan otonomi daerah turut memengaruhi efektivitas penyerapan investasi dan penyediaan infrastruktur digital (Khalid & Maidin, 2022). Beberapa daerah berhasil melakukan lompatan dalam digitalisasi layanan publik yang kemudian berdampak pada efisiensi ekonomi (Anggini et al., 2022). Akan tetapi, menurut (Novalia, 2023) masih banyak daerah yang terjebak dalam ketergantungan pada satu sektor komoditas tanpa adanya diversifikasi ekonomi yang didukung investasi. Hal ini menimbulkan risiko kerentanan ekonomi yang tinggi terhadap perubahan harga pasar internasional. Maka, penelitian ini akan melihat bagaimana variabel-variabel tersebut berperan dalam memperkuat struktur ekonomi regional Indonesia.

Landasan hukum dan kebijakan pemerintah pusat, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, dirancang untuk mempermudah arus investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi (Khalid & Maidin, 2022). Implementasi kebijakan ini diharapkan mampu merangsang pertumbuhan PDRB ADHK melalui penyederhanaan birokrasi di tingkat daerah. Selain itu, program akselerasi transformasi digital nasional juga menjadi pilar penting dalam memperkuat ekonomi daerah selama 2019-2024. Efektivitas dari kebijakan-kebijakan tersebut tercermin dari perubahan indikator ekonomi makro yang ada di setiap provinsi. Evaluasi terhadap dampak kebijakan melalui data statistik menjadi salah satu kontribusi praktis dari penelitian ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.

Jika melihat perbandingan penerapan variabel terhadap PDRB ADHK, terlihat adanya keterkaitan yang kompleks antara komposisi variabel independen dengan output ekonomi.



Gambar 1.4 Data Perbandingan Variabel Penelitian per provinsi

Sumber : BPS dan BPKM (Data diolah peneliti)

Jawa Barat memiliki kontribusi investasi yang sangat besar, sementara provinsi seperti Aceh menunjukkan ketergantungan yang lebih rendah pada investasi swasta dibandingkan variabel lainnya. Perbandingan ini mengindikasikan bahwa setiap provinsi memiliki karakteristik atau "mesin" penggerak ekonomi yang berbeda-beda. Dengan investasi yang kuat, PDRB ADHK mungkin tidak akan mencapai level optimal. Oleh karena itu, pengujian pengaruh secara simultan menjadi sangat relevan dilakukan dalam studi ini untuk menemukan proporsi pengaruh yang tepat.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terdapat kebutuhan mendesak untuk memetakan pengaruh variabel-variabel tersebut secara empiris dalam lingkup nasional. Ketidakpastian ekonomi yang terjadi selama tahun 2019 hingga 2024

memberikan momentum yang tepat untuk mengevaluasi ketahanan ekonomi regional Indonesia. Apakah investasi swasta tetap menjadi determinan utama, ataukah pengeluaran perkapita kini memegang peran yang lebih dominan dalam mendorong PDRB ADHK. Penentuan judul penelitian ini didasarkan pada keinginan untuk melihat gambaran utuh dari transformasi ekonomi Indonesia di tengah gelombang digitalisasi. Hasil analisis diharapkan mampu menjawab tantangan disparitas pertumbuhan ekonomi antar provinsi di masa depan.

Penelitian ini akhirnya difokuskan pada analisis pengaruh Investasi Swasta (PMDN dan PMA), dan Pengeluaran Perkapita terhadap PDRB ADHK Indonesia. Rentang waktu 2019-2024 dipilih untuk menangkap dinamika perubahan struktur ekonomi yang paling mutakhir dan relevan dengan kondisi saat ini. Dengan menggunakan metode analisis data panel, penelitian ini diharapkan dapat memberikan estimasi yang akurat mengenai kontribusi masing-masing variabel. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademis bagi pengembangan teori pertumbuhan ekonomi regional di negara kepulauan. Selain itu, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pertanyaan penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Investasi Swasta terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tingkat provinsi di Indonesia pada periode 2019–2024?
2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Perkapita terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tingkat provinsi di Indonesia pada periode 2019–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh Investasi Swasta terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tingkat provinsi di Indonesia pada periode 2019–2024.
2. Menganalisis pengaruh Pengeluaran Perkapita terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tingkat provinsi di Indonesia pada periode 2019–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan akademis

1. Penelitian ini diharapkan menjadi literatur ilmiah yang memperkaya kajian mengenai faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi wilayah, khususnya

peran investasi, dan pengeluaran perkapita dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tingkat provinsi di Indonesia.

2. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan model empiris dalam bidang ekonomi pembangunan, ekonomi makro terutama dalam menjelaskan bagaimana variabel pembentukan modal dari pihak swasta dan konsumsi rumah tangga secara simultan memengaruhi kinerja perekonomian daerah.
3. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian pada aspek lain yang berkaitan dengan PDRB, seperti efisiensi investasi, maupun faktor eksternal lainnya yang berpotensi memengaruhi dinamika ekonomi regional di Indonesia pasca-pandemi.
4. Penelitian ini bermanfaat bagi akademisi dan peneliti dalam memperkaya literatur serta diskusi akademik mengenai keterkaitan antara komposisi investasi asing dan domestik, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional dalam kerangka data panel antarprovinsi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam merumuskan kebijakan iklim investasi dan peningkatan konsumsi melalui pendapatan guna mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

2. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan di daerah sebagai dasar penyusunan strategi pembangunan ekonomi yang adaptif terhadap perubahan daya beli masyarakat serta sebagai acuan dalam mengoptimalkan penyerapan investasi domestik maupun asing di tingkat provinsi.
3. Penelitian ini memberikan informasi strategis bagi para investor, lembaga keuangan, dan pelaku usaha dalam memproyeksikan potensi pertumbuhan ekonomi regional, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan yang akurat dalam pengambilan keputusan investasi serta alokasi sumber daya di berbagai sektor produktif.
4. Penelitian ini bermanfaat bagi pembuat kebijakan dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah yang inklusif, melalui penyediaan data empiris mengenai pengaruh sinergi antara stabilitas pengeluaran masyarakat, dan aliran modal terhadap penguatan fundamental ekonomi nasional.